

Perihal: Mohon jaminan
keamanan.

Dili, 2 April 1997

Kepada

YM. Tuan Sekretaris Jenderal
Perwakilan Bangsa - Bangsa
(PBB)

di -

New York - AS.

Dengan hormat.

Semenjak daerah kelahiran saya (Kabupaten Ainaro) diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), saya senantiasa menentang setiap bentuk perilaku yang bernafaskan kolonial, termasuk tindak kekerasan, yang dipraktikkan oleh Aparat Pemerintah, terutama oknum-oknum anggota militer terhadap Rakyat Timor Timur yang tidak berdosa.

Lebih-lebih, dalam jangka waktu hampir 3 (tiga) tahun terakhir ini, saya semakin meningkatkan aktivitas saya, karena saya melihat seandainya tidak ada lagi jalan keluar lain.

Dalam hubungan ini, saya presentasikan sejumlah informasi ke hadapan YM. Tuan Sekretaris Jenderal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juli 1994, saya pernah menemui Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Tuan BACRE Waly NDIAYE, di Dili, Timor Timur. Dalam pertemuan tersebut, saya membantah statement Komandan Korem 16-4/WD, pada waktu itu, Kolonel JOHNY LUMINTANG, menjelang kunjungan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal itu. Inti statement tersebut bahwa, "di Timor Timur tidak

pernah ada eksekusi tanpa melalui proses pengadilan."

Dalam bantahan saya, saya mengangecat beberapa kasus faktual, yaitu eksekusi langsung dan sewenang-wenang yang ekstra-legal terhadap - yang saya tahu peroris - Antonio Carrarino (Menteri Kehakiman Fretilin), Leopoldo (Anggota Komite Central Fretilin), Domingos Mau-Mera (Delegado Fretilin di Ainaro), João Xavier (Delegado Fretilin di Ainaro) beserta 6 (enam) orang rekannya, serasan dua Pinto, Manuel Mau Caca, Paul dos Santos dan peristiwa pembunuhan massal lainnya di Ainaro.

2. Pada awal tahun 1986, saya pernah menangani secara langsung kasus tindak kekerasan dan penahanan ilegal oleh pihak militer terhadap 13 (tiga belas) orang penduduk sipil, di Kecamatan Zumalai, Kabupaten Covakima, hingga dibebaskan.

Langkah-langkah yang saya ambil dalam hal ini, adalah :

- a. Turun ke Zumalai (140 km arah selatan Kota Dili) dengan tujuan menjenguk para tahanan, sekaligus menjemput salah seorang tahanan, Sdr. BERNARDINO BIANCO yang telah melarikan diri;
 - b. Menghadap Komandan Korem 16.4/WO, Komandan Sgi dan Gubernur;
 - c. Membarita membuat surat seperti Gubernur, Komnas HAM dll. Surat terlampir (I).
3. Membantu menangani kasus perampokan dan peng-



aniayaan oleh pihak militer di Baucau terhadap Sr. Kintino EMANUEL, selubungan dengan kasus penembakan/pembunuhan Sersan Mayor Julião FRAGA.

Bukti penangkapan/penganiayaan sesuai laporan yang bersangkutan kepada Komnas HAM (Pernyataan di Bili) terlampir (II).

4. Membantu mengurus nasib para ex-tropas Portugis, yang hingga saat ini gagal diangkat menjadi PNS, karena dianggap menentang integrasi dan bulcan ex-tropas. Padahal Gubernur sendiri sudah pernah membuat pernyataan tertulis bahwa, mereka adalah bendu-bendu ex-tropas dan pantas diangkat menjadi PNS. Bantuan saya dalam bentuk menyusun surat para ex-tropas itu kepada Gubernur serta memberi petunjuk seperlunya. Surat terlampir (III).
5. Pada bulan Desember 1986, di Jakarta, saya menolak menandatangani surat pernyataan sikap Kepala Adat/Liurai, tokoh masyarakat dan generasi muda Timor Timur.

Alasan penolakan saya ialah :

- a. Surat pernyataan sikap bulcan dibuat oleh apa yang dinamakan Kepala Adat/Liurai, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda Timor Timur (penandatangan);
- b. Kami berangkat ke Jakarta bulcan atas kemauan sendiri, melawikan atas prakarsa dan usaha Gubernur dan petinggi tertentu di Jakarta;
- c. Isi pernyataan tersebut (terlampir) tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada di

Timor Timur;

- d. Saya dilarang ikut serta dalam rombongan menghadap DPR/MPR-Ri dan Menteri-menteri di Jakarta, karena berencana berbicara tentang situasi dan kondisi politik dan security di Timor Timur;
 - e. Kami disuruh ke Jakarta membuat pernyataan sikap dimaksud bertepatan dengan saat pemberian Hadiah Nobel kepada YM. Bapak Ustaz Diosis Dili, Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo dan Sr. Kami Tuan Dr. Jose Ramos Horta.
 - f. Selama di Jakarta, kami diurus oleh pihak militer, bukan oleh DPR/MPR-Ri atau Departemen yang terkait, bahkan tidak sekalipun oleh Aparat Kantor Penghubung Pemerintah Daerah ke Timor Timur di Jakarta.
 - g. Mayoritas dari kami yang dikirim ke Jakarta bukan Tokoh Adat/Liurai, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Generasi Muda dalam arti yang sebenarnya (tidak Representatif).
- Akibat dari sikap politik saya terselut, sekembalinya ke batis/Dili, saya dinonaktifkan dari jabatan saya selaku Sekretaris Pribadi Gubernur Timor Timur.
6. Pada tanggal 14 Februari 1997, saya membuat/meluarkan pernyataan politik, atas nama semua kaum nasionalis Timor Timur pro-kemerdekaan dalam dialog terbuka antara Generasi Muda Timor dengan sejumlah tokoh berpengaruh, pimpinan Pemerintah Daerah, ABRI dan Gereja di Timor Timur, di Gedung pertemuan Gubernur, Dili

Pernyataan tersebut saya sampaikan dalam bentuk analisis dan utas tentang penyelesaian masalah, Timor or Timur.

Konsekueni logisnya, pertama, dengan Surat Keputusan (tidak dapat saya lampirkan) pada surat ini karena saya harus diberi kesempatan membebernya pada saat hentele diperiksa) Gubernur membentuk 1 (satu) Tim untuk memeriksa saya dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena pernyataan saya itu dinilai mendiskreditkan Pemerintah RI. Tim itu terdiri dari orang-orang dari Istana DPR Gubernur, Direktorat Sosial Politik Propinsi, Inspektorat Wilayah Propinsi, Biro Hukum dan Biro Kepegawaian dengan Ketua-nya seorang Brigadir Jenderal bernama J. B. HARISOWO, selakuang menjabat Wakil Gubernur Timor Timur.

Kedua, berdasarkan Surat Undangan Nomor: UPN-1A/IRSTANA/II/1997 tertanggal 27 Pebruari 1997 yang menghadap 3 (tiga) orang perwira menengah (anggota Tim) untuk diperiksa atau didengar keterangannya pada tanggal 3 Maret 1997, di Kantor Istana DPR Gubernur.

Ketiga) orang perwira tersebut adalah:

a. Kolonel Sutino; > IRSTANA

b. Kolonel SIDA BALOK;

c. Letnan Kolonel PITER LOBO; → { Kantor Direktorat
Sospol Timor Tir

Pada kesempatan itu, melalui diskusi yang alot, y memakan waktu 4 (empat) jam, yaitu pukul 10.00 14.00, saya menyatakan menolak diperiksa, dengan alasan pokok:



- a. Dialog itu adalah dialog terbuka, yang diselenggarakan khusus untuk membicarakan masalah Timor Timur.
- b. Saya mengeluarkan statement tidak dalam kapasitas sebagai PNS, tetapi dalam kapasitas sebagai tokoh yang diundang untuk bicara. Pernyataan sikap menolak diperiksa saya buat dalam bentuk tertulis.

Ketiga, pada tanggal 4 Maret 1997, saya dipanggil menghadap Gubernur ABILIO di Ruang Kerja.

Pertemuan berlangsung dari pukul 12.10 - 14.00, disaksikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah H E TIMOR TIMUR, Bapak Drs. RAJAKARINA BRAHMANA.

Perdibatan berlangsung alot, dan saya tetap konsisten pada sikap saya semula, yaitu menolak diperiksa dengan alasan yang sama.

Karena menolak diperiksa, maka tidak ada pilihan lain bagi Gubernur, yaitu memutuskan

- a. Pemeriksaan dibatalkan dan kasus dinyatakan selesai;

- b. Saya diberhentikan dari jabatan Sekretaris Pribadi Gubernur dan dikembalikan ke Instansi Kerja saya (Inspektorat Wilayah Provinsi Timor Timur).

7. Pada pertengahan bulan Maret yang lalu, saya dan Srk. OSCAR LUCIO GONCALVES menulis sebuah surat tertanggal 16 Maret 1997 kepada Presiden RI.

Surat itu terlampir (VII).

8. Pada tanggal 24 Maret 1997, atas nama semua kaum nasionalis pro-Kemerdekaan



Timor Timur, terutama dari Partai Apodeti, saya dan saudara saya yang sama (OSCAR LÚCIO GONÇALVES) menghadap Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk masalah Timor Timur, Tuan JAMESHEED MARKER, di Dili.

Pada pertemuan tersebut, pertama, secara garis besar kami menggambarkan bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Rakyat Timor Timur selama 21 tahun Integrasi. Kedua, kami menyampaikan bahwa, hampir keseluruhan Rakyat Timor Timur menghendaki kebebasan dan kemerdekaan. Ketiga, kami mengusulkan diadakannya REFERENDUM di Timor Timur, sebagai cara Rakyat Timor Timur menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sebagai syarat bagi diadakannya REFERENDUM, kami juga mengusulkan sejumlah syarat sebagaimana tertera di dalam Surat kami kepada Presiden RI.

- g. Pada tanggal 25 Maret 1997, (tidak atas inisiatif saya) saya diwawancarai oleh wartawan luar negeri (Radio Portugal) melalui Telfon.

Karena langkah-langkah saya yang telah diutarakan di atas, menjelang akhir bulan Maret 1997 yang lalu, berkembang issue bahwa pihak militer di Timor Timur telah membentuk 1 (satu) Tim yang terdiri dari 12 (dua belas) orang, 6 (enam) orang di antaranya bersenjata untuk membunuh saya.

Meskipun belum tentu benar, saya hampir tidak meragukan, karena, di samping informasi itu didapat dari jaringan informan saya yang terpercaya, juga karena pada tanggal 20 Februari 1997 (sehari sesudah dialog terbuka) pukul 19.45, saat meng-

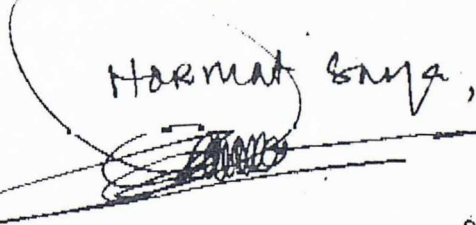
hentikan kendaraan saya untuk mengisi bahan bakar di daerah Batu Hada, bini, saya dan keluarga saya pernah ditembak dengan gas air mata dari dalam sebuah taksi yang tidak berhasil kami identifikasi.

Lebih jauh, hal lain yang takut membuat saya tidak ragu, karena selama ini, di Timor Timur, biasanya tokoh-tokoh politik yang berani melawan arus pemerintahan mati terbunuh secara tragis atau ditangkap, disiksa dan dipenjarakan secara ilegal.

Dengan demikian, maka melalui surat ini, saya mohon perhatian dan kemurahan hati YM. Tuan Sekretaris Jenderal PBB, kiranya berkenan memberikan jaminan keamanan kepada saya, dan juga kepada semua politikus Timor Timur yang pada waktu terakhir ini sedang berjuang dengan gigih untuk membebaskan dan memerdekakan Timor Timur.

Sebagai penutup, saya sampaikan rasa terima kasih disertai doa semoga YM senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan untuk memimpin Organisasi PBB memasuki Abad XXI dengan satu keyakinan dan optimisme yang lebih besar.

Hormat saya,


Dr. Francisco Lopes de Oliveira

Tembusan :

1. Komisi internasional HAM di Geneva;
2. Presiden Portugal di Lisbon;
3. Presiden RI di Jakarta;
4. YM. Sri Paus di Roma;
5. Senatur P. Kenedy di Washington AS;
6. YM. Bpk. Uskup Dili dan Baucau;
7. Pimpinan semua Paroki di Timor.

- 9 -

8. Dan Rem 16.4/WK di Dihi;
9. Gubernur KDA RI di Timor Timur;
10. Ketua DPRD RI di Timor Timur;
11. Ketua Delegasi ICRC di Dihi
12. Arsip. -

Catatan : Semua Tembusan, kecuali
untuk Komisi Internasional
HAM di Geneva, tanpa lam-
piran.

